

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NO.289/PID.SUS/PN.TPG)**

**Oleh
MARISA
NIM. 180574201070**

Abstrak

Residivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yang pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya. Kasus yang terjadi di Kota Tanjungpinang atas penyalahgunaan Narkotika ditetapkan berdasarkan Putusan No.289/Pid.Sus/2021/PN.Tpg dimana pelaku merupakan residivis tindak pidana narkotika. Berdasarkan putusan hakim menjatuhkan 5 Tahun pidana penjara kepada terpidana, sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana perlu adanya pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada residivis tindak pidana narkotika dan untuk menganalisa bagaimana sanksi pidana pada residivis tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas hukum dengan teknik pengumpulan sumber bahan hukum pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan sehingga penerapan pemberatan 1/3 tidak diterapkan, penjatuhan putusan dalam residivis tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kesimpulan penjatuhan sanksi pidana bagi residivis perlu adanya pemberatan sanksi pidana berdasarkan fakta hukum dan unsur-unsur pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Pemberatan pidana yang diberikan kepada pelaku residivis Tindak Pidana Narkotika perlu ditegakkan dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tujuan adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berjalan efektif serta mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Residivis, Pertimbangan Hakim, Pemberatan Sanksi Pidana.

**ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS ON RECIDIVISTS IN
NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS (STUDY OF DECISION
NO.289/PID.SUS/PN.TPG)**

**By :
MARISA
NIM. 180574201070**

Abstract

Recidivism is a repetition of a crime committed by a convict who has committed a previous criminal act. The case that occurred in Tanjungpinang City for Narcotics abuse was determined based on Decision No.289/Pid.Sus/2021/PN.Tpg where the perpetrator was a recidivist of narcotics crimes. Based on the judge's decision to sentence the convict to 5 years in prison, the criminal sanction given to the convict requires a weighting sentence as stipulated in Article 144 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this study is to analyze how the judge considers in imposing criminal sanctions on recidivists of narcotics crimes and to analyze how criminal sanctions on recidivists of narcotics crimes are based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study is a normative research method with a case approach, a statutory approach and a legal principle approach with the technique of gathering sources of legal materials. The results of the study found that the judge's considerations in making a decision did not take into account the aggravating circumstances so that the application of the 1/3 weighting was not applied, the imposition of a decision in the recidivism of narcotics crimes as stipulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The conclusion of the imposition of criminal sanctions for recidivists is that there is a need for weighting criminal sanctions based on legal facts and the elements of the judge's considerations in sentencing. The criminal burden given to recidivists of Narcotics Crime needs to be enforced in providing a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts so that the aim of imposing criminal sanctions on perpetrators of narcotics crimes runs effectively and supports government programs in eradicating narcotics abuse in Indonesia.

Keywords: Recidivist, Judge's Consideration, Aggravation of Criminal Sanctions.